

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Akuntabilitas Pegawai Publik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi yang menggunakan teori Han dan Perry (2019) yaitu *Attributability*, *Observability*, *Evaluability*, *Answerability*, dan *Consequentiality*. Pada dimensi *Attributability* memiliki tendensi pusat sebesar 52.5% menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan 4 bahwa masing-masing pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi saling memperhatikan kinerja pegawai lainnya, pegawai akan diberikan sanksi jika melakukan kesalahan dan pegawai merasa diawasi secara konsisten untuk mengikuti prosedur dan kebijakan organisasi. Kemudian, pada dimensi *Observability* memiliki tendensi pusat sebesar 57.5% menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan 4 bahwa pihak eksternal dapat mengetahui dan tertarik terhadap kinerja yang ASN DPPKB Kabupaten Bekasi lakukan.

Selanjutnya, pada dimensi, *Evaluability* memiliki tendensi pusat sebesar 50% menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan 4 bahwa hasil pekerjaan masing-masing kinerja pegawai dievaluasi secara ketat oleh atasan di DPPKB Kabupaten Bekasi. Setelah itu, pada dimensi *Answerability* memiliki tendensi pusat sebesar 47.5% menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan bahwa pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi tidak dapat membuat pernyataan palsu untuk membenarkan kinerjanya. Dan yang terakhir pada dimensi *Consequentiality* memiliki tendensi pusat sebesar 55% menyatakan sangat setuju dengan nilai kecenderungan 5 bahwa setengah dari jumlah responden sangat setuju bahwa pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga DPPKB Kabupaten Bekasi mendapatkan manfaatnya.

Maka, dapat disimpulkan sebagian tendensi pusat menyatakan setuju bahwa ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, tendensi pusat lainnya menyatakan cukup setuju dikarenakan belum seluruh ASN di lingkungan DPPKB

Kabupaten Bekasi menjalankan perkerjaan mereka berdasarkan prosedur dan kebijakan organisasi.

6.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan terkait akuntabilitas pegawai publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi harus lebih bertanggung jawab dalam memberikan alasan atau jawaban kepada organisasinya sesuai dengan apa yang dikerjakan.
2. Pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi harus lebih terbuka mengenai kinerja yang dilakukan agar pihak eksternal dapat dengan mudah mengetahui akuntabilitas kinerja yang dilakukan di dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakart: PT. Rineka Cipta .
- Bovens, Mark, Thomas Schillemans, and Robert E Goodin. 2014. *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press.
- Busuioc, Madalina, and Martin Lodge. 2016. "The Reputational Basis of Public Accountability." *Governance* 29 (2): 247-263.
- Desmiyawati, and Wulan Witaliza. 2012. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi." *Perbiks Jurnal* 4 (1): 26-33.
- Djalil, Rizal . 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBooks.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGMPress.
- Han, Yousueng, and James Perry. 2019. "Employee accountability: development of a multidimensional scale." *International Public Management Journal* 23 (2): 1-28.
- Jonathan, Koppel GS. 2005. "Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder"." *Public Administration Review* • 65 (1): 94-108.
- Koppell, Jonathan GS. 2005. "Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder"." *Public Administration Review* 65 (1): 94-108.
- Maani, Karjuni Dt. 2009. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Demokrasi* 8 (1): 47-60.
- Mulgan, Richard. 1997. "The Processes of Public Accountability." *Australian Journal of Public Administration* 56 (1): 25-36.

- Peraturan Bupati Bekasi No. 70 Tahun 2016. n.d. "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi ."
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Radin, Beryl A. 2011. "Does Performance Measurement Actually Improve Accountability?". NY: M.E. Sharpe.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2007. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2015. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *JKAP* 19 (1): 17.
- Wirijadinata, Jat Jat. 2007. "Standar Pelayanan Publik Dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah." *Jurnal Wacana Kinerja* 10 (4): 1-10.